EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATLINMAS MELALUI PROGRAM UJANG BARON DALAM MENUNJANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG

Fadhil Aprilyana
NPP. 33.0379
Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong
Email: aprilyanafadhil@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si
Email: dadangsupriatna892@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The development of the Community Protection Unit (Satlinmas) through the Ujang Baron Program in Bandung City remains suboptimal due to limited technical training, lack of standardized coaching modules, and inconsistent community participation. Despite its critical role in public peace and order (Trantibum), empirical studies specifically examining the effectiveness of Satlinmas development through this program remain scarce.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and describe the effectiveness of Satlinmas development through the Ujang Baron Program in supporting public peace and order in Bandung City.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews with 7 informants, and documentation. Analysis applied Robert J. Chaskin's (2001) Community Capacity Building theory focusing on four dimensions: leadership, participation, networks/collaboration, and resources.* ***Result:*** *Findings show that in the leadership dimension, the direction of development is relatively clear with formal training and field assistance, though understanding among members is still uneven. In the participation dimension, Satlinmas involvement is established in implementation, but community participation remains inconsistent and not yet culturally embedded. In the networks/collaboration dimension, inter-agency coordination has been built, though uneven across all areas. In the resources dimension, training materials and methods are sufficiently relevant, yet budget, facilities, time allocation, and training personnel remain limited.* ***Conclusion:*** *Satlinmas development through the Ujang Baron Program has been fairly effective but not yet optimal. Strengthening requires standardized training, greater resource support, and more active involvement of sub-districts, urban villages, and the community.*
Keywords: *Bandung City; effectiveness of development; ; public peace and order;Ujang Baron Program*

ABSTRAK

Permasalahan: Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Program Ujang Baron di Kota Bandung belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan pelatihan teknis, minimnya modul pembinaan yang terstandar, serta partisipasi masyarakat yang belum konsisten. Meskipun Satlinmas memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), kajian empiris yang secara

khusus meneliti efektivitas pembinaan Satlinmas melalui program ini masih sangat terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron dalam menunjang ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 7 informan, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori *Community Capacity Building* Robert J. Chaskin (2001) yang mencakup empat dimensi: kepemimpinan, partisipasi, jaringan/kolaborasi, dan sumber daya. **Hasil:** Pada dimensi kepemimpinan, arah pembinaan relatif jelas melalui binsat formal dan pendampingan lapangan, namun pemahaman anggota belum sepenuhnya merata. Pada dimensi partisipasi, keterlibatan Satlinmas terbentuk pada tahap pelaksanaan, tetapi partisipasi masyarakat belum konsisten. Pada dimensi jaringan/kolaborasi, koordinasi antaraktor telah terbangun, namun kualitasnya belum merata di seluruh wilayah. Pada dimensi sumber daya, materi dan metode pembinaan cukup relevan, namun masih terdapat keterbatasan anggaran, sarana prasarana, waktu, dan SDM pembina. **Kesimpulan:** Pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron berjalan cukup efektif namun belum optimal. Diperlukan standardisasi pembinaan, peningkatan dukungan sumber daya, serta pelibatan aktif kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. **Kata kunci:** Efektivitas pembinaan; Ketenteraman dan ketertiban umum; Kota Bandung Program Ujang Baron.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dibentuk sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 sebagai organisasi yang membantu pemerintah kelurahan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungan masyarakat.

Di Kota Bandung, dinamika kehidupan urban dan peningkatan mobilitas malam hari menyebabkan lonjakan laporan gangguan ketertiban dan keamanan publik (trantibum), terutama pada rentang pukul 22.00–03.00 WIB. Pola gangguan ini bukan hanya berdampak pada rasa aman warga, tetapi juga mengancam kualitas ruang publik malam hari, aktivitas ekonomi skala mikro, serta produktivitas komunitas yang bergantung pada ketenangan lingkungan. Menyikapi kondisi tersebut, Satpol PP Kota Bandung bersama berbagai pemangku kepentingan meluncurkan Program Ujang Baron (Urang Jaga Lingkungan Bareng Ronda) pada tahun 2019 sebagai inovasi praktis penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Program Ujang Baron merintis model kolaboratif yang menyatukan warga setempat, Satpol PP, dan Satlinmas untuk melakukan patroli bersama dan pengawalan kegiatan ronda secara terjadwal. Kegiatan dilaksanakan rutin setiap Senin hingga Kamis pada rentang waktu malam, dengan sasaran utama mengurangi insiden gangguan trantibum yang terjadi di periode rawan. Hingga saat ini, program tersebut telah menunjukkan jangkauan signifikan: melibatkan lebih dari 1.359 Rukun Warga (RW) yang tersebar di 151 kelurahan pada 30 kecamatan se-Kota Bandung. Capaian ini mencerminkan potensi jaringan kolaboratif yang luas dan komitmen

lokal untuk menjaga ketenteraman komunitas.

Efektivitas peran Satlinmas dalam mendukung Program Ujang Baron belum optimal. Hambatan utama teridentifikasi pada tiga aspek: ketersediaan sumber daya manusia (SDM), kualitas dan frekuensi pelatihan teknis, serta ketersediaan materi pembinaan yang terstandar. Pertama, jumlah personel Satlinmas di beberapa kelurahan masih terbatas sehingga beban tugas terpusat pada segelintir anggota, mengurangi kemampuan rotasi patroli dan kontinuitas pengawasan. Kedua, pelatihan teknis yang diberikan kepada anggota Satlinmas cenderung sporadis dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan operasional malam hari—misalnya teknik komunikasi antarpetugas, manajemen konflik saat menghadapi gangguan publik, pengaturan rute patroli terkoordinasi, serta prosedur keselamatan pribadi. Ketiga, minimnya modul pembinaan terpadu dan terstandar menyulitkan upaya replikasi praktik baik antar kelurahan serta menghambat evaluasi hasil pembinaan secara sistemik. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memunculkan beberapa dampak nyata: fluktuasi kualitas pelaksanaan ronda antar RW, rendahnya kapabilitas Satlinmas menghadapi insiden kompleks yang melibatkan massa atau pengguna ruang publik malam, serta kurangnya dokumentasi dan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kontribusi Satlinmas terhadap penurunan angka gangguan trantibum. Kondisi ini sekaligus membuka celah bagi potensi konflik berulang dan melemahnya kepercayaan publik terhadap upaya penanganan gangguan ketertiban lokal.

Pengalaman Program Ujang Baron menegaskan perlunya strategi penguatan Satlinmas yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Intervensi yang relevan meliputi peningkatan kuantitas dan distribusi SDM Satlinmas melalui rekrutmen dan insentif, penyusunan modul pelatihan teknis yang disesuaikan dengan situasi malam hari serta pendekatan manajemen konflik, serta pembuatan buku panduan dan kurikulum pembinaan terstandar yang mudah diadaptasi di semua kelurahan. Selain itu, pengembangan mekanisme koordinasi formal antara Satpol PP, pemerintah kelurahan, dan komunitas RW/RW (melalui forum rutin), serta sistem pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja (mis. frekuensi patroli, jumlah insiden, respons waktu) akan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program. Dengan demikian Program Ujang Baron menjadi contoh praktik inovatif penguatan siskamling berbasis kolaborasi multi-aktor di Kota Bandung yang telah mencapai skala luas. Namun, keberlanjutan dan dampaknya terhadap penurunan gangguan trantibum jangka menengah–panjang bergantung pada upaya sistematis untuk mengatasi keterbatasan SDM, meningkatkan kualitas pelatihan teknis, serta menyusun modul pembinaan terstandar bagi Satlinmas. Mengatasi hambatan ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas respons keamanan lingkungan malam hari, tetapi juga memperkokoh peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban sesuai amanat undang-undang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara urgensi kebutuhan akan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di Kota Bandung dengan efektivitas implementasi kebijakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Meskipun regulasi telah menetapkan Trantibum sebagai urusan wajib pelayanan dasar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan Satlinmas, yang difasilitasi melalui Program Ujang Baron, belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dinamika kriminalitas perkotaan seperti geng motor dan gangguan keamanan malam hari. Kesenjangan utama yang melatarbelakangi penelitian ini

terletak pada tiga aspek krusial, yaitu Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi Operasional. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 1556 Tahun 2018 sebagai pedoman teknis, namun efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya modul pembinaan yang terstandar serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan. Terdapat gap yang nyata antara desain program yang menuntut peran aktif Satlinmas sebagai garda terdepan dengan kemampuan teknis serta sarana prasarana yang tersedia di lapangan.

Kesenjangan Partisipasi Masyarakat, Program Ujang Baron dirancang berbasis partisipasi masyarakat untuk menghidupkan kembali sistem keamanan keliling (siskamling). Namun, terdapat realitas sosial perkotaan yang sarat dengan mobilitas tinggi, sehingga menciptakan celah antara desain kebijakan yang mengandalkan gotong royong dengan kondisi faktual warga yang sulit terlibat aktif secara konsisten. Partisipasi masyarakat yang fluktuatif ini mengakibatkan beban pengamanan lingkungan justru menjadi tumpuan bagi Satlinmas yang kapasitasnya belum optimal. Kesenjangan Pengetahuan, Minimnya kajian akademik yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas Program Ujang Baron memperlebar celah pengetahuan mengenai sejauh mana inovasi keamanan berbasis komunitas ini mampu menekan angka gangguan ketertiban secara empiris. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada peran Satpol PP secara umum atau regulasi perlindungan masyarakat, tanpa menyoroti secara mendalam interaksi antara mekanisme pembinaan dengan keberhasilan program inovatif di tingkat kewilayahan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menilai efektivitas pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya melihat dari sisi administratif, penelitian ini menggunakan teori *community capacity building* dari Robert J. Chaskin (2001) untuk mengidentifikasi hambatan nyata dalam dimensi kepemimpinan, partisipasi, jaringan/kolaborasi, dan sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjembatani gap antara kebijakan pemerintah yang bersifat formal dengan praktik di lapangan, guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Kota Bandung.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan dasar empiris bagi perumusan strategi pembinaan Satlinmas yang lebih efektif. Tanpa evaluasi berbasis penelitian, program berisiko berjalan secara administratif tanpa dampak signifikan terhadap trantibum. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi daerah perkotaan lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memperkuat siskamling berbasis komunitas.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi sejumlah kajian terdahulu yang relevan dengan tema pembinaan Satlinmas dan penguatan kapasitas komunitas dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Pramono dan Suranto (2022) meneliti peningkatan kapasitas Satlinmas di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa anggota Satlinmas sudah memposisikan diri sebagai objek utama pengembangan, namun terkendala keterbatasan anggaran dan SDM.

Temuan ini relevan bagi penelitian ini karena keduanya menghadapi persoalan sumber daya serupa, meskipun penelitian ini lebih menekankan evaluasi efektivitas program inovatif berbasis patroli langsung. Nugroho dan Supardal (2022) mengkaji kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan kurangnya minat generasi muda bergabung serta pemberdayaan personel yang belum maksimal di tingkat kelurahan. Temuan ini menjadi konteks perbandingan karena di Kota Bandung pemberian identitas keanggotaan (KTA) justru terbukti meningkatkan motivasi anggota Satlinmas.

Kinasih dan Pramono (2018) meneliti optimalisasi peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kota Surakarta dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana warga terlibat aktif dan menekankan peran strategis Satlinmas di tingkat kelurahan dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Relevansinya terletak pada kesamaan fokus terhadap peran kewilayahan Satlinmas, meskipun konteks lokusnya berbeda. Yurisandra (2025) mengkaji peranan Satgas Linmas dalam peningkatan kapasitas Satlinmas di Kota Bekasi menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Satgas Linmas terkendala anggaran, usia anggota, literasi teknologi, dan lemahnya regulasi. Berbeda dengan temuan peneliti yang menemukan adanya upaya adaptif Satpol PP Kota Bandung melalui penjadwalan bergilir dan pendekatan penghargaan sebagai strategi mengatasi keterbatasan serupa.

Winarko dan Mursyidah (2024) mengkaji pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan Tri Bina yang holistik. Penelitian ini menemukan bahwa Satlinmas berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, serta berperan dalam mendukung usaha lokal dan pelestarian lingkungan. Temuan ini memperkuat argumen penelitian ini bahwa integrasi Satlinmas dalam strategi keamanan publik yang lebih luas—seperti yang diterapkan dalam Program Ujang Baron, sangat penting untuk keberlanjutan program. Dengan demikian penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan Satlinmas sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kapasitas SDM, dan dukungan kelembagaan. Namun kesemuanya belum secara khusus menganalisis interaksi antara pembinaan Satlinmas dengan keberhasilan program inovatif seperti Ujang Baron, sehingga penelitian ini merupakan kontribusi yang baru dan distingtif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah *(Novelty)*

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena secara spesifik meneliti interaksi antara pembinaan Satlinmas dengan keberhasilan program inovatif berbasis komunitas (Ujang Baron). penelitian ini secara spesifik mengevaluasi Program Ujang Baron (*Urang Jaga Lingkungan Bareng Ronda*) sebagai inovasi kebijakan lokal di Kota Bandung. Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya meneliti efektivitas Satlinmas dalam konteks pelayanan publik yang bersifat umum atau penegakan regulasi konvensional, penelitian ini mengkaji upaya revitalisasi siskamling yang mengintegrasikan nilai gotong royong ke dalam sistem formal pemerintah daerah sebagai respons terhadap dinamika kriminalitas perkotaan yang spesifik, seperti gangguan geng motor dan kerawanan malam hari. penelitian ini menerapkan kerangka teori *Community Capacity Building* dari Robert J. Chaskin (2001) untuk membedah efektivitas

pembinaan Satlinmas secara lebih holistik. Sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada dimensi efisiensi dan responsivitas, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis keterkaitan dimensi kepemimpinan, partisipasi, jaringan/kolaborasi, dan sumber daya dalam membentuk kapasitas Satlinmas di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Hal ini memungkinkan analisis mendalam mengenai bagaimana aktor pelaksana berinteraksi dalam sistem keamanan berbasis komunitas di tengah karakteristik masyarakat yang heterogen.

kebaruan penelitian ini juga terletak pada substansi analisis dan rekomendasi yang dihasilkan. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada evaluasi output administratif, melainkan secara mendalam mengkaji interaksi antara mekanisme pembinaan dengan keterlibatan masyarakat di lapangan melalui observasi langsung pada titik-titik rawan. Dengan mengintegrasikan temuan empiris mengenai *gap* partisipasi masyarakat perkotaan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model pembinaan yang adaptif, yang menekankan pada standarisasi instruksi serta penguatan peran kecamatan/kelurahan sebagai episentrum koordinasi. Hal ini membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada dinamika di tingkat desa atau kalurahan yang memiliki karakteristik sosial-budaya lebih homogen. Melalui integrasi aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya di bidang Praktik Perpolisian Tata Pamong, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi daerah perkotaan lain dalam merancang kebijakan keamanan yang efektif dan berkelanjutan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron dalam menunjang ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam efektivitas pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Satpol PP Kota Bandung dan kelurahan-kelurahan lokus Program Ujang Baron, selama periode Januari–April 2026. Informan penelitian dipilih secara purposive sebanyak 7 orang yaitu Kepala Satpol PP Kota Bandung sebagai pemegang kebijakan utama; Subbagian Umum dan Kepegawaian; Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman; Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat/Seksi Bina Potensi sebagai informan kunci teknis pembinaan; Bidang Pemberdayaan Aparatur; petugas Satlinmas dari kelurahan Sekejati, Jatisari, Antapani, dan Cijawura; serta masyarakat pengguna layanan. Pemilihan informan ini dilakukan agar diperoleh gambaran utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, berdasarkan empat dimensi teori *Community Capacity Building Chaskin* (2001): kepemimpinan *(leadership),* partisipasi *(participation)*, jaringan/kolaborasi *(networks/collaboration),* dan sumber daya *(resources).*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efektivitas pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron di Kota Bandung menggunakan teori *Community Capacity Building* Robert J. Chaskin (2001). Kota Bandung merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik kewilayahan dinamis. Secara administratif, kota ini terbagi ke dalam 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Keberagaman luas wilayah dan jumlah kelurahan di setiap kecamatan mencerminkan kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, khususnya di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas). Sebaran kewilayahan ini menjadi lokus utama bagi implementasi Program Ujang Baron, di mana setiap kecamatan dan kelurahan memegang peran vital sebagai ujung tombak pengawasan lingkungan. Berikut adalah rincian luas wilayah dan jumlah kelurahan di Kota Bandung:

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Bandung

Kecamatan	Luas wilayah (Km^2)	Jumlah Kelurahan
Andir	3,71	6
Astana Anyar	2,89	6
Antapani	3,79	4
Arcamanik	5,87	4
Babakan Ciparay	7,45	6
Bandung Kidul	6,06	4
Bandung Kulon	6,46	8
Bandung Wetan	3,39	3
Batununggal	5,03	8
Bojongloa Kaler	3,03	5
Bojongloa Kidul	6,26	6
Buahbatu	7,93	4
Cibeunying Kaler	3,37	4
Cibeunying Kidul	3,46	6
Cibiru	6,32	4
Cicendo	6,86	6
Cidadap	-	3
Cinambo	3,68	4
Coblong	-	6
Gedebage	9,58	4
Kiaracondong	6,12	6
Lengkong	5,90	7
Mandalajati	6,67	4
Panyileukan	5,10	4
Rancasari	7,33	4

Regol	4,30	7
Sukajadi	-	5
Sukasari	-	4
Sumur Bandung	3,40	4
Ujungberung	6,40	5
TOTAL		**151**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa distribusi kelurahan di Kota Bandung tidak merata di setiap kecamatan, dengan rata-rata kecamatan memiliki 5 hingga 8 kelurahan. Luas wilayah yang bervariasi, dari yang terkecil hingga mencapai 9,58 km² (Kecamatan Gedebage), memberikan implikasi langsung terhadap jangkauan patroli dan efektivitas pembinaan Satlinmas. Kondisi geografis yang luas dan padat penduduk ini menuntut strategi pembinaan yang tidak bisa diseragamkan (*one-size-fits-all*). Oleh karena itu, Program Ujang Baron harus mampu beradaptasi dengan karakteristik setiap wilayah, memastikan bahwa keberadaan Satlinmas di 151 kelurahan tersebut dapat berjalan secara sistematis guna menekan potensi gangguan ketertiban umum di titik-titik rawan yang tersebar di seluruh penjuru kota.

Ketenteraman dan ketertiban umum (*Trantibum*) merupakan indikator utama stabilitas sosial yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat daerah. Sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi, Kota Bandung menghadapi dinamika permasalahan sosial yang kompleks, yang berdampak langsung pada statistik gangguan ketertiban. Data berikut menyajikan rekapitulasi gangguan *Trantibum* yang dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung selama periode 2018–2020:

Tabel 2

Jumlah Gangguan Trantibum di Kota bandung

Jenis Kriminalitas *(Kind of Criminality)*	**2018**	**2019**	**2020**
Curanmor R-2	329	291	284
Curanmor R-4	59	44	24
Curi Berat	365	331	261
Curi Keras	181	110	105
Curi Biasa	176	146	189
Aniaya Ringan	43	43	39
Aniaya Berat	243	237	211
Penipuan	769	750	962
Penggelapan	284	268	377
Peras / Anc.Keras	58	38	34
Pengrusakan	36	28	33
Pembunuhan	0	4	1
Perkosaan	11	5	1
Perzinahan	11	12	5
Penculikan	2	3	2

Pemalsuan Mata Uang	1	1	5
Pemalsuan Surat	32	43	26
Pemalsuan Merk	4	2	6
Sumpah Palsu	0		0
Perjudian	4	6	5
Penghinaan	13	22	19
Penadahan	2	2	1
Korupsi	0	1	2
Senpi, Handak, Sajam	37	29	47
Lain-lain Kriminalitaas	834	832	775
Jumlah	**3 494**	**3 248**	**3 414**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa fluktuasi gangguan ketertiban umum di Kota Bandung masih berada pada angka yang signifikan, dengan total kasus mencapai 3.494 pada tahun 2018, sempat menurun menjadi 3.248 pada tahun 2019, dan kembali meningkat menjadi 3.414 kasus pada tahun 2020. Kasus penipuan menjadi jenis kriminalitas yang mendominasi dengan tren peningkatan tajam pada tahun 2020 (962 kasus), diikuti oleh berbagai bentuk tindak pencurian serta gangguan keamanan lainnya. fluktuasi angka gangguan tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap ketenteraman masyarakat tidak bersifat linear dan terus menuntut kewaspadaan. Kepadatan penduduk yang tinggi serta karakteristik wilayah yang heterogen menuntut adanya sistem pengawasan yang adaptif dan proaktif di setiap level kewilayahan. Oleh karena itu, data ini menjadi pijakan empiris yang kuat bahwa peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Program Ujang Baron sangatlah krusial. Dengan penguatan kapasitas melalui pembinaan yang berkelanjutan, Satlinmas diharapkan mampu menjalankan fungsi deteksi dini dan pengamanan lingkungan secara lebih responsif, sehingga mampu menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman yang lebih baik bagi seluruh warga Kota Bandung

3.1. Kepemimpinan *(Leadership)*

Kepemimpinan merupakan dimensi pertama yang menentukan kejelasan arah, tujuan, serta kemampuan pembina dalam menggerakkan pelaksana di tingkat kewilayahan. Secara struktural, pembinaan Satlinmas berada di bawah Bidang Perlindungan Masyarakat, Seksi Bina Potensi Satpol PP Kota Bandung. Program Ujang Baron lahir dari inisiatif pimpinan sebagai respons atas kondisi keamanan malam hari yang rawan, dengan orientasi kepemimpinan yang bersifat persuasif dan partisipatif. Pembinaan dilaksanakan melalui dua pola: binsat formal pada jam kerja, dan pendampingan lapangan melalui kegiatan Ujang Baron. Evaluasi dilakukan pasca kegiatan untuk melihat tingkat partisipasi, kondisi kerawanan wilayah, dan tindak lanjut yang diperlukan. Namun, pemahaman anggota Satlinmas terhadap arah pembinaan belum merata karena pendampingan dari tingkat kecamatan belum konsisten. Berikut adalah rekapitulasi analisis dimensi kepemimpinan berdasarkan temuan lapangan:

Tabel 3

Rekapitulasi Dimensi Kepemimpinan (Leadership) dalam Pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron di Kota Bandung

Indikator	Temuan Lapangan	Analisis & Kesimpulan
Kejelasan Arah dan Tujuan Pembinaan	Tujuan pembinaan diarahkan menciptakan rasa aman. Binsat formal mencakup materi tugas Satlinmas, PBB, bela diri, dan perlengkapan. Pemahaman anggota meningkat tetapi belum merata—masih terfokus pada aspek operasional.	Arah pembinaan cukup jelas secara kelembagaan. Namun, internalisasi tujuan pada level anggota belum optimal karena belum meratanya pendampingan kecamatan. Indikator ini dinilai CUKUP BAIK, perlu penguatan.
Bentuk dan Kualitas Arahan/Pengawasan	Dua pola: binsat formal siang hari; Ujang Baron sebagai wahana praktik lapangan. Evaluasi berkala pasca kegiatan. Pendampingan oleh unsur kecamatan belum konsisten.	Mekanisme pengawasan substantif sudah berjalan namun belum merata antarwilayah. Indikator ini dinilai CUKUP BAIK, perlu pemerataan supervisi kewilayahan.
Kemampuan Pembina Memobilisasi Satlinmas dan Warga	Anggota Satlinmas memperoleh peningkatan semangat dan legitimasi sosial melalui pemberian KTA. Keterlibatan warga belum selalu konsisten. Satlinmas belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan.	Mobilisasi Satlinmas baik pada aspek pelaksanaan. Namun mobilisasi masyarakat belum merata dan keterlibatan perencanaan terbatas. Indikator ini dinilai CUKUP, perlu penguatan pelibatan partisipatif.

Sumber: diolah, oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan data diatas, Dimensi kepemimpinan dalam Program Ujang Baron telah berhasil meletakkan fondasi dasar bagi kesiapan operasional Satlinmas di Kota Bandung. Pola pembinaan yang mengombinasikan instruksi formal dengan pendampingan lapangan terbukti

efektif meningkatkan kepercayaan diri anggota, terutama dengan adanya penguatan identitas melalui pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA). Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada belum meratanya pengawasan di tingkat kecamatan dan keterbatasan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat secara konsisten. Ke depan, penguatan kepemimpinan harus diarahkan pada pelibatan Satlinmas sejak tahap perencanaan program, bukan hanya sebagai pelaksana, serta meningkatkan intensitas supervisi dari unsur kewilayahan agar tujuan pembinaan dapat terinternalisasi secara utuh di seluruh pelosok kelurahan.

3.2. Partisipasi *(Participation)*

Partisipasi merupakan dimensi krusial yang mengukur sejauh mana keterlibatan aktif Satlinmas dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (*Trantibum*). Dalam perspektif pengembangan kapasitas komunitas, partisipasi tidak sekadar dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan ronda, melainkan sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan. Program Ujang Baron dirancang sebagai katalisator untuk menumbuhkan partisipasi tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah, Satlinmas, dan warga. Keberhasilan dimensi ini sangat bergantung pada kemampuan program dalam menciptakan ruang bagi Satlinmas untuk berperan aktif dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan siskamling yang berkelanjutan. Partisipasi mengukur keterlibatan aktif Satlinmas dan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, Satlinmas sudah terlibat langsung dalam patroli, ronda, dan pengamanan lingkungan bersama Satpol PP. Namun, keterlibatan Satlinmas masih dominan pada tahap pelaksanaan, bukan pada perencanaan. Partisipasi masyarakat menunjukkan hasil beragam aktif di beberapa wilayah, namun masih lemah di wilayah lain akibat kesibukan, kejenuhan, dan rendahnya kesadaran kolektif. Berikut adalah rekapitulasi analisis dimensi partisipasi berdasarkan temuan lapangan:

Tabel 4

Rekapitulasi Dimensi Partisipasi (Participation) dalam Pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron di Kota Bandung

Indikator	Temuan Lapangan	Analisis & Kesimpulan
Tingkat Kontribusi Satlinmas	Satlinmas terlibat aktif dalam patroli, ronda, dan pengamanan lingkungan. Pemahaman tugas dan rasa percaya diri meningkat. Namun peran dalam penentuan jadwal ronda masih terbatas.	Kontribusi dalam pelaksanaan dinilai CUKUP BAIK. Perlu peningkatan keterlibatan pada tahap perencanaan agar anggota memiliki rasa kepemilikan lebih kuat terhadap program.

Konsistensi Kehadiran dan Keterlibatan Satlinmas	Kehadiran Satlinmas sudah lebih baik; hampir setiap RW memiliki unsur Satlinmas. KTA meningkatkan legitimasi sosial. Namun intensitas keterlibatan masih dipengaruhi dinamika wilayah.	Konsistensi kehadiran dinilai CUKUP BAIK namun belum seragam di seluruh kelurahan. Perlu penguatan keberlanjutan yang lebih stabil dan merata antarwilayah.
Inisiatif Satlinmas dalam Menggerakkan Warga	Di sebagian wilayah warga aktif ikut ronda; di wilayah lain partisipasi rendah. Hambatan: kesibukan pekerjaan, kejenuhan, dan rendahnya kesadaran kolektif.	Keterlibatan masyarakat sudah mulai terbentuk namun belum menjadi budaya sosial yang kuat. Partisipasi warga dinilai SEDANG, perlu pendekatan komunikatif dan inovatif.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel daiatas, Dimensi Partisipasi dalam Program Ujang Baron telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal keterlibatan operasional Satlinmas di lapangan. Pemberian identitas keanggotaan (KTA) terbukti efektif dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan diri Satlinmas saat berinteraksi dengan warga. Namun, tantangan utama yang harus segera diatasi adalah belum optimalnya partisipasi pada tahap perencanaan dan rendahnya konsistensi keterlibatan masyarakat secara luas. Upaya penguatan partisipasi ke depan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih inklusif, di mana Satlinmas diberi ruang dalam penyusunan strategi wilayah, serta adanya inovasi kegiatan ronda agar tidak monoton bagi warga. Dengan memperkuat partisipasi dari sisi perencana dan pelaksana secara beriringan, diharapkan Program Ujang Baron dapat menjadi budaya keamanan berbasis komunitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bandung.

3.3. Jaringan/Kolaborasi *(Networks/Collaboration)*

Dimensi jaringan atau kolaborasi menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas pembinaan Satlinmas, mengingat penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (*Trantibum*) merupakan tanggung jawab lintas sektor yang tidak dapat dilakukan secara parsial. Keberhasilan Program Ujang Baron sangat bergantung pada jalinan kerja sama antara Satpol PP sebagai pembina, Satlinmas sebagai garda terdepan di kelurahan, serta elemen kewilayahan lainnya seperti unsur kelurahan/kecamatan, TNI, Polri, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini berfungsi untuk memperluas dukungan sumber daya, mempercepat alur informasi, serta menciptakan sinergi dalam merespons potensi gangguan

keamanan. Dimensi ini menelaah sejauh mana hubungan kerja tersebut terintegrasi menjadi sistem keamanan lingkungan yang responsif dan kolaboratif. Jaringan atau kolaborasi menunjukkan kekuatan hubungan kerja, komunikasi, dan koordinasi antaraktor. Program Ujang Baron dibangun di atas pola kolaboratif antara Satpol PP, Satgas Linmas, Satlinmas kelurahan, aparatur kewilayahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat. Pemanfaatan *WhatsApp Group* menjadi saluran utama pelaporan awal gangguan Trantibum. Satlinmas berperan sebagai simpul komunikasi di tingkat lingkungan, menjadi penghubung antara warga dan aparat. Berikut adalah rekapitulasi analisis dimensi jaringan/kolaborasi berdasarkan temuan lapangan:

Tabel 5

Rekapitulasi Dimensi Jaringan/Kolaborasi (Networks/Collaboration) dalam Pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron di Kota Bandung

Indikator	Temuan Lapangan	Analisis & Kesimpulan
Intensitas dan Kualitas Koordinasi	Koordinasi melibatkan Satpol PP, Satgas Linmas, kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Namun peran kecamatan belum konsisten.	Koordinasi sudah terbentuk dan cukup intens. Namun kualitas belum merata karena keterlibatan kecamatan belum optimal. Indikator ini dinilai CUKUP BAIK, perlu penguatan peran kecamatan.
Mekanisme Komunikasi dan Pelaporan Gangguan Trantibum	Pelaporan melalui WhatsApp Group, WA pengaduan masyarakat, surat tertulis, datang langsung, LAPOR, dan media sosial. Satlinmas berperan sebagai penyampai informasi awal.	Mekanisme komunikasi sudah cukup beragam. Namun efektivitas bergantung pada keaktifan warga dan konsistensi koordinasi. Indikator ini dinilai CUKUP BAIK, belum optimal di seluruh wilayah.
Peran Satlinmas sebagai Penghubung antara Warga dan Aparat	Satlinmas berposisi sebagai mata dan telinga awal. Dalam praktiknya mereka menyampaikan laporan awal kepada kelurahan atau Satgas Linmas saat	Peran penghubung sudah terbentuk, baik secara teknis maupun sosial. Efektivitasnya bergantung pada keaktifan anggota dan respons cepat aparat. Indikator ini dinilai CUKUP, perlu penguatan kedisiplinan komunikasi.

	terjadi potensi gangguan.	

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

Data diatas menunjukkan, dimensi jaringan atau kolaborasi dalam Program Ujang Baron telah membentuk pola kerja sinergis yang menghubungkan berbagai lapisan kepentingan, dari tingkat kota hingga akar rumput. Pemanfaatan media komunikasi digital seperti WhatsApp Group secara signifikan telah memangkas jarak antara warga dengan pihak berwenang, menjadikan Satlinmas sebagai titik simpul vital dalam arus informasi keamanan. Meskipun demikian, terdapat tantangan pada ketimpangan kualitas koordinasi yang disebabkan oleh belum meratanya partisipasi aktif unsur kecamatan di setiap wilayah. Kedepannya, penguatan kolaborasi harus difokuskan pada standarisasi alur koordinasi lintas sektor yang lebih formal dan konsisten, serta penguatan peran Satlinmas sebagai penghubung yang responsif, sehingga setiap potensi gangguan ketertiban dapat dimitigasi sejak dini melalui jejaring kerja yang tangguh dan terintegrasi.

3.4. Sumber Daya *(Resources)*

Dimensi sumber daya merupakan elemen penentu keberlangsungan sekaligus batasan operasional dalam pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dalam kerangka kerja *community capacity building*, sumber daya tidak hanya mencakup ketersediaan aspek fisik seperti sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup kompetensi SDM pembina, relevansi materi, kecukupan waktu pelaksanaan, hingga dukungan anggaran. Keterbatasan pada dimensi ini sering kali menjadi penghambat utama dalam merealisasikan standar pembinaan yang ideal di seluruh wilayah kelurahan yang luas dan heterogen. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini bertujuan untuk memotret sejauh mana Satpol PP Kota Bandung mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang ada untuk tetap menjalankan Program Ujang Baron secara adaptif dan berkesinambungan. Sumber daya merupakan dimensi keempat yang mencakup materi dan metode pembinaan, sarana prasarana, serta dukungan anggaran, waktu, dan SDM pembina. Satpol PP Kota Bandung memiliki total 691 personel (termasuk 99 Satgas Linmas) dan potensi Satlinmas kota sebesar 10.139 orang. Pembinaan dilaksanakan melalui binsat formal dan Ujang Baron sebagai wahana praktik lapangan, dengan frekuensi sekitar dua kali per bulan secara bergilir. Hasil SKM Semester II 2025 menunjukkan bahwa unsur Kompetensi Pelaksana (3,174) dan Sarana dan Prasarana (3,234) menjadi nilai terendah sekaligus prioritas perbaikan. Berikut adalah rekapitulasi analisis dimensi sumber daya berdasarkan temuan lapangan:

Tabel 6

Rekapitulasi Dimensi Sumber Daya (Resources) dalam Pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron di Kota Bandung

Indikator	Temuan Lapangan	Analisis & Kesimpulan
Ketersediaan dan Relevansi Materi, Metode, dan	Materi binsat: aturan dasar, PBB, bela diri, borgol, tonfa, patroli, antisipasi	Materi dan metode relevan dengan kebutuhan dasar lapangan. Frekuensi dan jangkauan perlu ditingkatkan. SKM 2025 mengkonfirmasi perlunya peningkatan

Frekuensi Pembinaan	situasi. Metode variatif (binsat + praktik Ujang Baron). Frekuensi ±2x/bulan bergilir; belum menjangkau 151 kelurahan secara merata.	kompetensi pelaksana. Indikator ini dinilai CUKUP BAIK, belum optimal dalam jangkauan dan intensitas.
Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendukung	Sarana: pakaian dinas, KTA, borgol, tonfa, kendaraan patroli (110 unit roda 2, 51 unit roda 4). Di tingkat wilayah masih ada kekurangan perlengkapan; sebagian mengandalkan iuran warga.	Sarana dasar tersedia namun belum merata dan pemeliharaan belum optimal. SKM 2025 menempatkan sarana prasarana sebagai prioritas perbaikan. Indikator ini dinilai PERLU PENINGKATAN SIGNIFIKAN.
Dukungan Anggaran, Waktu, dan SDM Pembina	Tidak ada anggaran khusus berdiri sendiri untuk Ujang Baron. Pembinaan bergilir karena keterbatasan personel—satu pembina bisa menangani lebih dari satu kelurahan. Di tingkat RW, operasional masih bergantung pada iuran warga.	Keterbatasan anggaran, waktu, dan SDM menjadi kendala utama pemerataan pembinaan. Strategi adaptif (jadwal bergilir, dukungan dasar, penghargaan kelurahan aktif) diterapkan namun belum mengatasi semua kekurangan. Indikator ini dinilai PERLU PENGUATAN MENDESAK.

Sumber: Dioalah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dimensi sumber daya mencerminkan tantangan klasik dalam pembinaan masyarakat berbasis kewilayahan di lingkungan perkotaan yang padat. Meskipun materi dan metode yang dikembangkan oleh Satpol PP Kota Bandung terbukti relevan dan praktis untuk kebutuhan lapangan, keterbatasan anggaran serta rasio jumlah pembina terhadap luas wilayah kerja menjadi hambatan struktural yang nyata. Strategi adaptif seperti penjadwalan bergilir dan pemanfaatan fasilitas pendukung secara bertahap terbukti mampu menjaga eksistensi program, namun belum menjamin standar kualitas yang seragam di seluruh

kelurahan. Ke depan, diperlukan kebijakan penganggaran yang lebih terencana dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang lebih akurat agar Program Ujang Baron tidak hanya sekadar berjalan, tetapi mampu beroperasi secara optimal sebagai sistem keamanan lingkungan yang tangguh dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron telah berjalan cukup efektif, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa program telah mampu membangun mekanisme pembinaan yang nyata di lapangan, namun masih menghadapi sejumlah kendala pada aspek konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas, dan kesinambungan koordinasi. Dengan demikian, Program Ujang Baron dapat dipandang sebagai inovasi yang memiliki daya dorong positif terhadap penguatan peran Satlinmas, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor implementatif yang belum sepenuhnya stabil. Hasil ini sejalan dengan kajian Nurhayunda dan Reviandani (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas pembinaan Satlinmas sangat bergantung pada konsistensi kegiatan, kualitas pelatihan, serta koordinasi antarinstansi. Dalam konteks penelitian ini, konsistensi kegiatan menjadi penting karena pembinaan tidak cukup hanya dilakukan secara seremonial atau insidental, tetapi harus berlangsung terarah dan berkelanjutan agar anggota Satlinmas memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas, fungsi, dan orientasi kerja. Kualitas pelatihan juga menjadi faktor penentu karena materi pembinaan yang baik akan meningkatkan kapasitas anggota dalam menghadapi dinamika keamanan lingkungan, sementara koordinasi antarinstansi diperlukan agar pembinaan tidak berjalan parsial dan terputus di level pelaksana.

Pada dimensi kepemimpinan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya pendekatan yang persuasif dan partisipatif dalam pengelolaan Program Ujang Baron. Pola ini selaras dengan pandangan Winarko dan Mursyidah (2024) bahwa keberhasilan pemberdayaan Satlinmas mensyaratkan keterpaduan antara pengembangan manusia dan lingkungan. Dalam praktiknya, kepemimpinan yang persuasif mendorong anggota untuk terlibat bukan karena tekanan struktural, melainkan karena kesadaran akan pentingnya menjaga ketenteraman lingkungan. Sementara itu, pendekatan partisipatif membuka ruang bagi anggota Satlinmas untuk merasa memiliki program, sehingga keterlibatan mereka menjadi lebih aktif, sukarela, dan berkelanjutan. Keterpaduan antara pengembangan kapasitas individu dan dukungan lingkungan sosial inilah yang memperkuat daya kerja Satlinmas dalam mendukung program pembinaan di tingkat kewilayahan. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) dan identitas keanggotaan di Kota Bandung justru menjadi faktor penguat motivasi bagi Satlinmas. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Nugroho dan Supardal (2022) yang menunjukkan rendahnya minat generasi muda di Kabupaten Sleman untuk bergabung dalam Satlinmas. Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa penguatan legitimasi sosial melalui pengakuan formal atas identitas keanggotaan dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan rasa bangga, rasa memiliki, dan motivasi berpartisipasi. Dalam konteks Kota Bandung, KTA bukan hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga sebagai simbol pengakuan institusional yang membuat anggota merasa dihargai dan diakui perannya dalam struktur sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek simbolik dan legitimatif dalam pembinaan kelembagaan memiliki pengaruh yang nyata terhadap semangat

anggota.

Keterbatasan koordinasi di tingkat kecamatan masih menjadi hambatan yang cukup menonjol dan sejalan dengan temuan Yurisandra (2025) mengenai lemahnya peran Satgas Linmas di Kota Bekasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran penghubung antara kebijakan kota dan implementasi lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Koordinasi yang belum kuat menyebabkan pembinaan berjalan tidak merata, pendampingan tidak konsisten, serta pemahaman anggota terhadap arah program menjadi bervariasi. Akibatnya, potensi Satlinmas sebagai kekuatan sosial berbasis masyarakat belum dapat dimobilisasi secara maksimal. Hambatan ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi operasional yang memastikan pembinaan dapat diterjemahkan secara seragam di tingkat kelurahan dan RW. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pembina juga memperkuat temuan Pramono dan Suranto (2022) bahwa sumber daya tetap menjadi hambatan struktural dalam penguatan Satlinmas. Dalam praktik pembinaan, keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya frekuensi pelatihan, minimnya dukungan operasional, serta rendahnya intensitas monitoring dan evaluasi. Sementara itu, keterbatasan SDM pembina menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang dan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan Satlinmas tidak hanya ditentukan oleh komitmen kebijakan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya yang memadai. Tanpa penguatan aspek anggaran dan SDM, program yang baik berisiko tidak mencapai hasil maksimal.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Program Ujang Baron telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pembinaan Satlinmas, terutama melalui pendekatan kepemimpinan yang persuasif, pemberian identitas kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan yang relatif konsisten. Namun demikian, sejumlah hambatan struktural dan operasional masih membatasi capaian program, terutama pada aspek koordinasi, kapasitas pembina, dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang lebih sistematis agar efektivitas pembinaan Satlinmas tidak hanya bersifat cukup, tetapi juga mampu berkembang menjadi optimal dan berkelanjutan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Program Ujang Baron tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan patroli atau penguatan siskamling, tetapi juga berhasil membangun dimensi psikologis dan sosial yang penting bagi anggota Satlinmas. Pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) menumbuhkan rasa bangga, pengakuan, dan legitimasi sosial di kalangan anggota, sehingga mereka tidak lagi memandang keterlibatan dalam Satlinmas semata sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai bentuk pengabdian yang memiliki nilai simbolik dan sosial. Dalam konteks pembinaan kelembagaan, penguatan identitas formal seperti ini menjadi penting karena mampu meningkatkan rasa memiliki, memperkuat komitmen, dan mendorong partisipasi yang lebih konsisten dalam menjalankan tugas di lingkungan masing-masing. Selain itu, lahirnya inovasi Program Jawara Sakti sebagai derivasi dari Ujang Baron memperlihatkan adanya adaptivitas Satpol PP Kota Bandung dalam merespons karakteristik kewilayahan yang berbeda-beda. Wilayah dengan tingkat kerawanan yang lebih tinggi memerlukan pendekatan yang lebih intensif, terfokus, dan responsif terhadap dinamika keamanan setempat. Karena itu, pengembangan Jawara Sakti dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang tidak bersifat seragam, melainkan

disusun berdasarkan kebutuhan riil lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan Satlinmas di Kota Bandung telah bergerak ke arah model yang lebih kontekstual, di mana strategi intervensi disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kapasitas sosial masyarakat setempat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang masih membatasi optimalisasi program. Salah satunya adalah belum tersedianya modul pembinaan yang terstandarisasi secara merata. Ketiadaan standar pembinaan yang seragam menyebabkan materi, metode, dan kualitas pendampingan berpotensi berbeda antarwilayah, sehingga pemahaman anggota Satlinmas terhadap tugas, fungsi, dan prosedur kerja menjadi tidak sepenuhnya sama. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan variasi kapasitas antaranggota dan menghambat terbangunnya pola kerja yang profesional dan terukur. Kendala berikutnya adalah kesibukan masyarakat perkotaan yang menyebabkan partisipasi dalam kegiatan Satlinmas tidak selalu dapat dilakukan secara konsisten. Pola kehidupan urban yang padat, tuntutan pekerjaan, serta mobilitas masyarakat yang tinggi berdampak pada sulitnya menjaga kesinambungan kehadiran anggota dalam kegiatan pembinaan maupun ronda malam. Akibatnya, partisipasi sering kali bergantung pada situasi dan ketersediaan waktu warga, bukan pada jadwal yang benar-benar stabil. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi program berbasis partisipasi komunitas, karena keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh keterlibatan warga secara berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran turut menjadi hambatan serius dalam mendukung operasional program, terutama di tingkat RW. Dalam banyak kasus, dukungan kegiatan masih bergantung pada iuran warga untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar, seperti perlengkapan ronda, konsumsi, atau dukungan teknis lainnya. Ketergantungan pada swadaya masyarakat ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, struktur pembiayaannya belum sepenuhnya kuat dan masih rentan terhadap variasi kemampuan ekonomi warga. Jika tidak diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah, keberlanjutan program berisiko menghadapi kendala dalam jangka panjang, terutama pada wilayah dengan kapasitas sosial-ekonomi yang terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa Program Ujang Baron dan pengembangannya melalui Jawara Sakti merupakan bentuk inovasi pembinaan Satlinmas yang cukup berhasil dalam membangun legitimasi sosial, rasa bangga anggota, serta adaptasi terhadap tingkat kerawanan wilayah. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan penguatan pada aspek standarisasi modul pembinaan, strategi peningkatan partisipasi masyarakat perkotaan, dan dukungan anggaran yang lebih memadai agar operasional di tingkat RW tidak terus-menerus bergantung pada iuran warga. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, keberlanjutan program akan tetap sangat bergantung pada inisiatif lokal yang belum tentu seragam antarwilayah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Program Ujang Baron dalam menunjang ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan Efektivitas Pembinaan Satlinmas melalui Program Ujang Baron berjalan cukup efektif namun belum optimal. Meskipun arah pembinaan melalui binsat formal dan pendampingan lapangan sudah jelas, internalisasi pemahaman di tingkat anggota belum merata, serta partisipasi masyarakat

masih fluktuatif dan belum terinternalisasi sebagai budaya kolektif yang kuat di seluruh wilayah. Kendala yang Dihadapi: Pelaksanaan pembinaan terkendala oleh keterbatasan anggaran operasional, rasio SDM pembina yang tidak sebanding dengan luas wilayah, sarana prasarana pendukung yang belum merata, serta koordinasi lintas sektor yang belum konsisten, terutama pada level kecamatan sebagai penanggung jawab kewilayahan. Upaya yang Dilakukan: Satpol PP Kota Bandung telah menempuh berbagai upaya adaptif, meliputi pelaksanaan binsat rutin, pendampingan lapangan secara bergilir, optimalisasi saluran komunikasi digital untuk pelaporan gangguan, pemberian dukungan operasional dasar, serta pengembangan strategi motivasi melalui penghargaan bagi wilayah dengan siskamling aktif.
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada jangkauan lokus yang hanya berfokus pada beberapa kelurahan di Kota Bandung, sehingga temuan ini tidak dapat digeneralisasikan secara mutlak bagi seluruh karakteristik wilayah urban lainnya. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses data primer pada tingkat pelaksana di lapangan membatasi pendalaman aspek-aspek sosiologis yang lebih mendalam mengenai pola partisipasi masyarakat.
Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah atau antarkota guna memvalidasi model pembinaan Satlinmas yang lebih terstandarisasi. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai peran teknologi informasi dan *smart policing* dalam mendukung sistem keamanan berbasis masyarakat, agar efektivitas Program Ujang Baron di masa depan dapat lebih terukur melalui basis data yang terintegrasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung beserta seluruh jajaran dan anggota Satlinmas yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih kepada Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Chaskin, R. J. (2001). Building community capacity: A definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. *Urban Affairs Review*, 36(3), 291–323. https://doi.org/10.1177/10780870122184876

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia.

Farhan, A. (2023). Inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(2), 111–123. https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.111-123

Ismail, M. S. (2017). *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. BUKU ETIKA PEMERINTAHAN.

Kinasih, W., & Pramono, J. (2018). Optimalisasi peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 33–44. https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1922

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

Nugroho, D. S., & Supardal, S. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 122–129. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262

Nurhayunda, N., & Reviandani, O. (2025). Efektivitas Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam mendukung kesiapsiagaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 606–614. https://doi.org/10.61579/future.v3i2.420

Pramono, J., & Suranto, J. (2022). Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Abdimas Serawai*, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.4599

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2024). Analysis of the enforcement of regional regulations on public order, peace, and community protection in Bandung City. *Jurnal Tatapamong*, 6(2), 172–187. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/5041

Rowa, H. (2021). *Organisasi pemerintahan dalam teori & praktik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi ilmu pemerintahan*. Alfabeta.

Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriatna, D., Madjid, U., & Ismail. (2025). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Alqaprint Jatinangor.

Susi, A., Hidayat, A., & Abas, M. (2024). Implementasi peran fungsi dan kewenangan Satpol PP dalam penertiban gelandangan pengemis mengenai tertib sosial di Kabupaten Karawang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 317–327. https://doi.org/10.31933/av1d1q74

Winarko, A. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowerment of Satlinmas in improving public order and security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1137